

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang masif di era industri 4.0 telah mendorong transformasi digital secara fundamental dalam manajemen birokrasi pemerintahan di Indonesia. Transformasi ini dimanifestasikan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Fokus utama dari SPBE adalah penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam ekosistem birokrasi, salah satu aspek krusial yang mengalami digitalisasi adalah sistem manajemen kehadiran pegawai, yang merupakan indikator dasar profesionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU) sebagai aplikasi mobile berbasis geolokasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKon). Aplikasi ini memungkinkan ASN melakukan check-in/check-out secara real-time melalui perangkat Android/iOS, dengan fitur deteksi radius lokasi, notifikasi pengingat, dan pelaporan otomatis. Implementasi ini didasarkan pada Peraturan Bupati HSU Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan meningkatkan disiplin kehadiran, transparansi, dan efisiensi administrasi kepegawaian (situs resmi SIPP HSU, 2025).

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama dalam birokrasi pemerintahan dituntut untuk memiliki profesionalisme, integritas, serta disiplin kerja yang tinggi. Disiplin kerja ASN merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban hadir dan menaati ketentuan jam kerja sebagai bagian dari tanggung jawab.

Penerapan sistem presensi berbasis aplikasi diharapkan mampu meminimalkan praktik manipulasi data kehadiran, meningkatkan akurasi pencatatan waktu hadir dan pulang, serta memperkuat sistem pengawasan kedisiplinan pegawai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kehadiran pegawai dapat membantu organisasi menjalankan proses administrasi secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, sistem presensi digital memungkinkan pengawasan kehadiran dilakukan secara lebih objektif sehingga dapat mendorong peningkatan disiplin kerja pegawai.

SIPP HSU hadir sebagai aplikasi berbasis *mobile* yang memanfaatkan teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan biometrik untuk memastikan kehadiran pegawai secara *real-time*. Aplikasi ini memiliki fitur keamanan berlapis, seperti deteksi *Fake GPS*, pengenalan wajah, serta mekanisme *geofencing* yang membatasi radius presensi hanya di sekitar titik koordinat kantor. Implementasi ini bertujuan untuk menciptakan data kehadiran yang akurat sebagai dasar penilaian kinerja objektif serta penentuan besaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2024.

Kantor Kecamatan Banjang, sebagai salah satu garda terdepan pelayanan publik di Kabupaten HSU, memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan fungsi-fungsi kecamatan sangat bergantung pada konsistensi kehadiran pegawainya.

Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan ketentuan presensi melalui aplikasi SIPP HSU. Berdasarkan hal tersebut maka instansi pemerintah dituntut untuk menentukan manajemen pengolahan data presensi yang baik, cepat dan efisien.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui adanya permasalahan yang muncul pada Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya:

1. Gangguan jaringan internet dan server yang menyebabkan kegagalan presensi real-time. masih terdapat kendala teknis pada jaringan/server aplikasi SIPP, meskipun gangguan tersebut tidak terjadi secara sering, pegawai mengalami kesulitan saat melakukan presensi real-time, sehingga proses check-in atau check-out menjadi terhambat.
2. Belum konsistennya kepatuhan terhadap jam kerja. Meskipun aplikasi SIPP HSU telah diterapkan, masih terdapat beberapa pegawai yang datang terlambat. Berdasarkan rekapitulasi presensi bulan Januari hingga Maret 2026, tercatat 38 orang pegawai yang terlambat, total 200 kali keterlambatan yang diterima, dan 15 kali keterlambatan yang tidak diterima oleh admin.

3. Pengawasan langsung dari BKPSDM terhadap penggunaan aplikasi SIPP HSU yang belum dilaksanakan pada kantor kecamatan Banjang. Meskipun aplikasi mampu menghasilkan data kehadiran secara otomatis, pengawasan di tingkat kecamatan masih lebih banyak dilakukan oleh pimpinan dan admin lokal melalui rekapan bulanan. Pengawasan dari BKPSDM Kabupaten hanya dilakukan melalui sistem secara daring, tanpa kunjungan langsung ke kantor untuk evaluasi lebih mendalam. Hal ini menyebabkan tindak lanjut terhadap penggunaan aplikasi SIPP HSU belum berjalan secara lebih intensif.

Berdasarkan fenomena tersebut oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN PRESENSI PEGAWAI (SIPP HSU) PADA KANTOR KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, yang berkaitan pada efektivitas aplikasi SIPP HSU pada Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penelitian ini di batasi menggunakan teori Gibson (Tangkalisan 2005, dalam Affandi, A. et al. 2023:90-92) yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat

6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas aplikasi SIPP HSU pada Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SIPP HSU pada Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas aplikasi SIPP HSU pada Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SIPP HSU

E. Manfaat penelitian

1. Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam rangka meningkatkan teori dan ilmu pengetahuan administrasi khususnya dalam bidang kebijakan publik.

2. Praktis

Secara praktis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya pada Kecamatan dalam menentukan langkah kebijakan untuk meningkatkan perbaikan dan sebagai bahan evaluasi dalam hal penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.